

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Belajar dan Pembelajaran

1. Pengertian Belajar

Belajar adalah suatu proses dimana peserta didik yang harus aktif, guru hanya berperan sebagai fasilitator. “Guru hanyalah merangsang keaktifan dengan jalan menyajikan bahan pelajaran, sedangkan yang mengolah dan mencerna adalah peserta didik itu sendiri sesuai kemauan, kemampuan, bakat, dan latar belakang masing-masing” (Asri Budinangsih: 2004: 10).

Sebagaimana dikatakan Arikunto (1993 :19) bahwa: “belajar diartikan sebagai suatu proses yang terjadi karena adanya usaha untuk mengadakan perubahan dalam diri manusia yang melakukan, dengan maksud memperoleh perubahan dalam dirinya baik berupa pengetahuan, keterampilan maupun sikap”. Perubahan tingkah laku tidak akan terjadi tanpa adanya usaha yang dilakukan oleh siswa. Usaha tersebut merupakan aktivitas belajar siswa. Aktivitas merupakan asas yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran, sebagaimana dikatakan Sardiman (2004 : 95) bahwa: “aktivitas belajar merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar”.

Menurut Thursan Hakim (2000: 01) mengatakan bahwa “ belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia dan perubahan tersebut di tempatkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan pengetahuan, sikap, pemahaman. daya pikir dan pengetahuan “.

Menurut Hamalik (1983:24-25) bahwa segala kegiatan belajar yang di lakukan seseorang yang berupa kegiatan mendengarkan, merenungkan. menganalisa, berpikir, membandingkan, dan menghubungkan dengan masa lampau.

Menurut Gagne (1984:) belajar didefinisikan sebagai suatu proses dimana suatu organisme berubah perilakunya akibat suatu pengalaman. Galloway dalam Toed Soekamto (1992: 27) mengatakan belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi dan faktor-faktor lain berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Sedangkan Morgan menyebutkan bahwa suatu kegiatan dikatakan belajar apabila memiliki tiga ciri ciri sebagai berikut:

1. belajar adalah perubahan tingkah laku;
2. perubahan terjadi karena latihan dan pengalaman, bukan karena pertumbuhan;
3. perubahan tersebut harus bersifat permanen dan tetap ada untuk waktu yang cukup lama.

Pembelajaran adalah proses membuat orang belajar. Guru bertugas membantu orang belajar dengan cara memanipulasi lingkungan sehingga siswa dapat belajar dengan mudah, artinya guru harus mengadakan pemilihan terhadap

berbagai strategi pembelajaran yang ada. yang paling memungkinkan proses belajar siswa berlangsung optimal. Dalam pembelajaran proses belajar tersebut terjadi secara bertujuan dan terkontrol. Sedangkan belajar itu sendiri adalah :

Belajar adalah proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seseorang seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir dan lain-lain kemampuan (Thursan Hakim, 2005: 1).

Berdasarkan defenisi di atas, yang sangat perlu digaris bawahi adalah bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seseorang diperlihatkan dalam bentuk bertambahnya kualitas dan kuantitas kemampuan orang itu dalam berbagai bidang. Dalam hal aktivitas belajar dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Mendengarkan
- b. Memandang
- c. Meraba, membau, dan mencicipi! mencecap
- d. Menulis atau mencatat
- e. Membaca
- f. Membuat ikhtisar atau ringkasan dan menggarisbawahi
- g. Mengamati tabel-tabel, diagram-diagram dan bagan-bagan
- h. Menyusun paper atau kertas kerja
- i. Mengingat
- j. Berpikir
- k. Latihan dan praktek

Meskipun orang mempunyai tujuan tertentu dalam belajar serta telah memilih sikap yang tepat untuk merealisasikan tujuan itu, namun tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan itu sangat dipengaruhi oleh situasi. Setiap situasi dimanapun dan kapan saja memberikan kesempatan belajar kepada seseorang.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam belajar adalah prinsip-prinsip belajar.

Adapun prinsip-prinsip belajar tersebut sebagai berikut

- a. Belajar harus berorientasi pada tujuan yang jelas.
- b. Proses belajar akan terjadi apabila seseorang dihadapkan pada situasi problematis.
- c. Belajar dengan pengertian akan lebih bermakna dari pada belajar dengan hafalan.
- d. Belajar merupakan proses kontinu.
- e. Belajar memerlukan kemampuan yang kuat.
- f. Keberhasilan ditentukan oleh banyak faktor.
- g. Belajar memerlukan metode yang tepat.
- h. Belajar memerlukan adanya kesesuaian antara guru dan murid.
- i. Belajar memerlukan kemampuan dalam menangkap intisari pelajaran itu sendiri.

(Thursan Hakim, 2005: 2)

Lebih lanjut dikatakan bahwa “Belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian.”

(Witherington, dalam buku Dalyon, 1997: 211).

Perwujudan perilaku belajar biasanya lebih sering tampak dalam perubahan perubahan sebagai berikut:

1. Kecakapan.
2. Keterampilan.
3. Pengamatan.
4. Berpikir asosiatif dengan daya ingat.
5. Berfikir rasional.
6. Sikap.
7. Inhibisi.

8. Apresiasi.
 9. Tingkah laku efektif.
- (Dalyon, 1997:2 13)

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku seseorang yang diperlihatkan dalam bentuk perubahan tingkah laku yang menjadi lebih baik dari sebelumnya.

2. Pengertian Pembelajaran

“Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran “. (Oemar Hamalik,1995: 57)

Berdasarkan pengertian di atas, pembelajaran semestinya dirancang agar dapat memperlancar proses belajar mengajar. Guru atau perancang pengajaran harus terlebih dahulu menyusun rencana pengajaran sebelum melakukan proses belajar mengajar.

Jenis pembelajaran ada yang bersifat insidental dan ada yang bersifat terprogram. Pembelajaran insidental bukan merupakan kebiasaan utama sebagai guru. Pembelajaran yang terprogram dengan baik merupakan kebiasaan yang professional. Dalam pembelajaran yang terprogram, guru merancang dan menyusun materi, metode serta media pembelajaran. Jadi, pembelajaran direncanakan dengan tidak asal-asalan dan bukan sekedar mengejar atau mentransfer ilmu pengetahuan saja sebab hasil pembelajaran bisa berpengaruh secara langsung pada orang yang diajarkan.

Pembelajaran merupakan proses belajar yang dialami siswa. Pengalaman belajar siswa juga bisa didapatkan dari berbagai informasi seperti tulisan-tulisan, didapatkan dari gambar-gambar yang berkaitan dengan materi belajar, dan juga bisa didapatkan dari siaran televisi atau gambaran atas gabungan beberapa objek secara fisik dimana guru akan memberikan arahan atau aturan untuk memandu siswa tersebut.

Sugiartini dalam Ristina (2009: 15) mengemukakan mengenai pembelajaran sebagai berikut:

Pembelajaran dapat diartikan sebagai upaya yang sistemik dan disengaja untuk menciptakan kondisi-kondisi agar terjadi kegiatan belajar membelajarkan. Dalam kegiatan itu terjadi interaksi antara kedua belah pihak, yaitu peserta didik (warga belajar) yang melakukan kegiatan belajar, dengan pendidik (sumber belajar) yang melakukan kegiatan membelajarkan.

Disimpulkan bahwa pembelajaran itu merupakan proses interaksi belajar mengajar antara kedua belah pihak, yaitu antara siswa dan guru guna terjadinya perubahan, pembentukan, dan diharapkan nantinya memiliki pola perilaku yang lebih baik ke depan. Pembelajaran juga merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan yang merupakan keberhasilan guru dan siswa.

Dan menurut Depdiknas (2002: 1-3) prinsip kegiatan pembelajaran itu antara lain:

- a. Mengalami, yaitu melalui pengalaman langsung tentang apa yang sedang dipelajari, akan lebih mengaktifkan indera dari pada hanya mendengarkan secara lisan.
- b. Interaksi, yaitu antara siswa dengan lingkungan sosialnya (guru dan teman) melalui diskusi, saling bertanya dan menjelaskan.
- c. Komunikasi, yaitu pengungkapan isi pikiran sendiri maupun mengomentari gagasan orang lain akan mendorong siswa untuk

membenahi gagasannya dan menetapkan pemahaman tentang apa yang sedang dipelajari.

- d. Refleksi, yaitu memikirkan ulang apa saja yang sedang dikerjakan atau dipikirkan akan lebih baik memantapkan pemahaman. Guru harus siap memberikan tanggapan terhadap gagasan atau pendapat yang dikomunikasikan oleh siswa.
- e. Mengembangkan keingintahuan, imajinasi dan fitrah bertuhan, yaitu rasa ingin tahu dan berimajinasi menghasilkan sikap peka, kritis, mandiri dan kreatif. Sedangkan fitrah bertuhan menghasilkan sikap taqwa.
- f. Membangkitkan motivasi siswa, yaitu motivasi (daya dorong untuk belajar) dipengaruhi oleh keingintahuan dan keyakinan akan kemampuan diri melalui antara lain: pemberian tugas dan sekaligus meyakinkan kepada siswa bahwa mereka pasti bisa.
- g. Memantapkan pengalaman awal siswa, yaitu siswa membangun pengalaman terhadap apa yang dipelajari, diwarnai oleh pengetahuan awal yang dimilikinya. Guru harus berupaya untuk menggali pengalaman awal siswa sebelum melalui pembelajaran.
- h. Menyenangkan siswa, yaitu suasana belajar sangat mempengaruhi efektifitas proses belajar mengajar. Siswa akan sulit membangun pemahaman dalam keadaan tertekan, guru harus dapat menciptakan suasana yang menyenangkan atau mengasyikkan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa, dengan pendidikan belajar sambil bermain dan bereksperimen.
- i. Tugas yang menantang, yaitu semakin banyak waktu konsentrasi anak maka semakin baik hasil belajarnya. Konsentrasi akan terjadi bila siswa mendapat tugas yang menantang (sedikit melebihi kemampuannya).
- j. Pemberian kesempatan belajar, yaitu belajar merupakan suatu proses membangun pemahaman. Guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir pada saat memecahkan masalah dan membangun gagasannya sendiri.
- k. Memperhatikan keragaman individu, yaitu proses pembelajaran dan penilaian harus memperhatikan karakteristik siswa yang beragam. Keberagaman mencakup cara belajar, minat, kesenangan, kemampuan dan pengalaman awal.
- l. Belajar untuk kebersamaan yaitu tugas-tugas memungkinkan siswa untuk bekerja baik secara mandiri maupun kelompok. Kegiatan pembelajaran berbasis kompetensi menuntut pendekatan kolaboratif antara siswa, sekolah, orang tua, perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pendidikan.

3. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Proses pembelajaran adalah suatu proses belajar dan mengajar yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Sebagai suatu proses

pembelajaran, belajar merupakan suatu proses kegiatan aktif siswa dalam membangun makna atau pemahaman dari pengalaman baru berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki. Belajar merupakan suatu proses perubahan dalam diri seseorang yang ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seseorang seperti peningkatan pengetahuan, pemahaman, kecakapan, daya pikir, sikap, kebiasaan dan lain-lain.

Sebagaimana dikatakan Arikunto (1993: 19) bahwa: "belajar diartikan sebagai suatu proses yang terjadi karena adanya usaha untuk mengadakan perubahan dalam diri manusia yang melakukan, dengan maksud memperoleh perubahan dalam dirinya baik berupa pengetahuan, keterampilan maupun sikap". Perubahan tingkah laku tidak akan terjadi tanpa adanya usaha yang dilakukan oleh siswa. Usaha tersebut merupakan aktivitas belajar siswa. Aktivitas merupakan asas yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran, sebagaimana dikatakan Sardiman (2004: 95) bahwa: "aktivitas belajar merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar".

Budimansyah (2007: 34) menjelaskan bahwa *Civic Education* dikembangkan sebagai *central goal* dari sistem pendidikan, dipersyaratkan untuk seluruh tingkatan sekolah yang menerapkan pembelajaran yang "*of high quality and sufficient quantity*," menggunakan pendekatan yang bersifat "interdisciplinary" dan metode pembelajaran yang bersifat "*interactive*".

Desain kurikulum yang menitikberatkan pada "*how to think rather than what to think*" merefleksikan "*community realities*" yang mencakup materi

“*historical*” dan *contemporary*, memperlakukan kelas sebagai “*democratic laboratory*.” Kontribusi masyarakat dalam “*civic education*” dan melibatkan siswa dalam masyarakat untuk mendapatkan “*civic experiences in the community*.” Paradigma ini tampaknya merupakan pengembangan secara sinergistik dari tradisi “*citizenship transmission, social science dan reflective inquiry dalam social studies*.”

Citizenship transmission yang dikembangkan adalah pemahaman, penghayatan, dan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam proses demokrasi konstitusional negaranya, sedangkan dimensi *social science* yang dikembangkan adalah cara berpikir “*interdisciplinary dan inquiry*” yang bertolak dari ilmu politik, dan dimensi “*reflective inquiry*” yang dikembangkan adalah kemampuan dalam “*decision making process*” mengenai dan dalam praksis demokrasi konstitusional negaranya.

Diharapkan melalui konsep-konsep di atas agar nantinya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di masa mendatang akan lebih baik sehingga dapat menghasilkan warga negara yang baik dan cerdas untuk membangun bangsa ini dan memiliki daya saing atau kompetisi secara global. Somantri (2001: 299) mengemukakan mengenai perumusan pendidikan kewarganegaraan yang cocok dengan Indonesia.

Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa atas dasar batasan itulah maka pendidikan kewarganegaraan harus mengenai sasaran kebutuhan para siswa. Mereka jangan terlalu banyak diberi hal-hal yang terlalu abstrak, tetapi hal-hal yang nyata dan berguna bagi kehidupan sehari-hari, tanpa mengurangi tujuan idiilnya.

Budimansyah (2008: 14) mengemukakan bahwa pada saat Kurikulum 2004 disosialisasikan di sekolah-sekolah, yang dikenal dengan sebutan kegiatan *floating*, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Standar Nasional Pendidikan (PP SNP) diterbitkan, PP tersebut mengamatkan bahwa yang berwenang menyusun kurikulum adalah satuan pendidikan yang disebut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Sementara dalam kurikulum 2004, kurikulum masih disusun oleh pemerintah. Jika hal ini dibiarkan berarti kita melanggar aturan. Maka dilakukanlah perubahan berkelanjutan (kontinu) yang dilakukan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Dengan menggunakan bahan dasar Kurikulum 2004 BSNP mengembangkan Standar Isi (Permen Nomor 22 Tahun 2006) dan Standar Kompetensi Lulusan (Permen Nomor 23 Tahun 2006).

Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan itu merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam menyusun KTSP. Dalam Standar Isi maupun Standar Kompetensi Lulusan, PPKn diubah lagi namanya menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Dalam dokumen tersebut ditegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.

- a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi.
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Harus diakui bahwa dalam melaksanakan tugas dan perannya sebagai guru *civics* tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan, melainkan guru *civics* dihadapkan pada sejumlah tantangan yang harus diketahui dan dipahami oleh para guru. Sebagaimana dikemukakan Somantri dalam Wuryan (2008: 46) bahwa guru *civics* dituntut harus memahami: (a) berbagai macam teknik mengajar, (b) hubungan bahan pelajaran *civics* dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, (c) lingkungan masyarakat, agama, sains dan teknologi, dan (d) menganalisis karakter kata-kata ilmu sosial yang dapat ditafsirkan dari berbagai arti sudut pandang, terlebih latar belakang siswa yang berbeda-beda. Hal inilah yang oleh Samuelson disebut dengan tirani kata-kata (*tyranny of words*).

Mark dalam Wuryan (2008: 46) mengemukakan bahwa berkenaan dengan kesulitan mengajar *civics* adalah “*to steer between dull memorization of facts on one hand, and broad unsupported generalization on the other.*” Artinya, guru harus memadukan hapalan-hapalan dengan kehidupan yang sebenarnya dalam masyarakat. Dengan memadukan “*dull memorization*” dengan kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, maka para siswa dapat dilatih untuk berpikir, bersikap, dan bertindak demokratis di dalam kelas. Dengan kata lain, guru-guru harus melatih para siswa untuk berlatih menemukan konsensus dalam kehidupan masyarakat yang demokratis.

Tantangan lain yang dihadapi oleh guru *civics* menurut Somantri adalah kenyataan bahwa dalam pembelajaran ilmu-ilmu sosial, seperti pembelajaran *civics*, sejarah, geografi, ekonomi dan sebagainya seringkali mengundang rasa bosan dan menjenuhkan di kalangan siswa. Pertanyaannya adalah mengapa hal ini dapat terjadi? Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah (a) sifat ilmu sosial yang berbeda dengan ilmu alam atau eksakta, (b) bahasa dalam ilmu sosial dapat ditafsirkan dari berbagai sudut pandang (*point of view*) atau bersifat *multi interpretation*, lebih-lebih latar belakang siswa yang berbeda, (c) buku teks ilmu sosial kurang menghubungkan teori dan kegiatan dasar manusia, dan (d) banyaknya isu-isu kontroversial dalam pelajaran ilmu-ilmu sosial.

Senada dengan hal tersebut di atas Mulyasana dalam Djahiri (2006: 166) mengemukakan bahwa

Pada kenyataannya, proses pembelajaran di Indonesia dititikberatkan pada pencapaian target kurikulum dengan menggunakan angka dan

ijasah sebagai alat ukur keberhasilan. Kondisi ini telah memaksa terbentuknya iklim kelas yang hanya menetapkan nilai dan ijasah sebagai ukuran prestasi belajar. Dengan demikian tidaklah keliru apabila orientasi belajar para peserta didik akan melakukan “penghalalan” segala cara untuk memperoleh nilai dan ijasah. Merekayasa tugas pun akan dinyatakan sah demi nilai dan ijasah.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dalam praktiknya saat ini hendaknya lebih ditekankan pada pembentukan pada proses pemberdayaan warga negara, sehingga mereka mampu berperan sebagai *partner* pemerintah dalam menjalankan tugas kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Karena itu, pendidikan kewarganegaraan, diarahkan pada upaya pemberdayaan peserta didik menjadi manusia yang bermartabat, mampu bersaing dan unggul di zamannya, serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan di lingkungannya. Dalam posisi inilah pembelajaran pendidikan kewarganegaraan diarahkan pada proses pembebasan peserta didik dari ketidakbenaran, ketidakadilan, ketidakjujuran.

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan upaya-upaya yang terencana dan terarah dalam suatu terutama dalam pembelajaran PKn yang mampu menggali seluruh potensi individu/warga negara secara cerdas dan efektif demi terbentuknya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Untuk itu, diperlukan pembaharuan/reformasi konsep dan paradigma pembelajaran PKn dari yang hanya menekankan pada aspek kognitif menjadi penekanan pada pengembangan proses institusi-institusi negara dan kelengkapannya (Wahab, 1999).

Budimansyah (2008: 182) mengungkapkan bahwa perlu dilakukan revitalisasi PKn agar menjadi “subjek pembelajaran yang kuat (*powerful learning area*) yang secara kurikuler ditandai oleh pengalaman belajar secara kontekstual dengan ciri-ciri bermakna (*meaningful*), terintegrasi (*integrated*), berbasis nilai (*value based*), menantang (*challenging*) dan mengaktifkan (*activating*).

Suryadi (1999: 31) mengemukakan bahwa *Civic Education* menekankan pada empat hal: Pertama, *Civic Education* bukan sebagai indoktrinasi politik, *Civic Education* sebaiknya tidak menjadi alat indoktrinasi politik dari pemerintahan yang berkuasa. *Civic Education* seharusnya menjadi bidang kajian kewarganegaraan serta disiplin lainnya yang berkaitan secara langsung dengan proses pengembangan warga negara yang demokratis sebagai pelaku-pelaku pembangunan bangsa yang bertanggung jawab. Kedua, *Civic Education* mengembangkan *state of mind*, pembangunan karakter bangsa merupakan proses pembentukan warga negara yang cerdas serta berdaya nalar tinggi. *Civic education* memusatkan perhatian pada pembentukan kecerdasan (*civic intelligence*), tanggung jawab (*civic responsibility*), dan partisipasi (*civic participation*) warga negara sebagai landasan untuk mengembangkan nilai dan perilaku demokrasi. Demokrasi dikembangkan melalui perluasan wawasan, pengembangan kemampuan analisis serta kepekaan sosial bagi warga negara agar mereka ikut memecahkan permasalahan lingkungan. Kecakapan analitis itu juga diperlukan dalam kaitan dengan sistem politik, kenegaraan, dan peraturan perundang-undangan agar pemecahan masalah yang mereka lakukan adalah realistis.

Ketiga, *Civic Education* adalah suatu proses pencerdasan, pendekatan mengajar yang selama ini seperti menuangkan air ke dalam gelas (*watering down*) seharusnya diubah menjadi pendekatan yang lebih partisipatif dengan menekankan pada latihan penggunaan nalar dan logika. *Civic education* membelajarkan siswa memiliki kepekaan sosial dan memahami permasalahan yang terjadi di lingkungan secara cerdas. Dari proses itu siswa dapat juga diharapkan memiliki kecakapan atau kecerdasan rasional, emosional, sosial dan spiritual yang tinggi dalam pemecahan permasalahan sosial dalam masyarakat.

Keempat, *Civic Education* sebagai lab demokrasi, sikap dan perilaku demokratis perlu berkembang bukan melalui mengajar demokrasi (*teaching democracy*), akan tetapi melalui penerapan cara hidup berdemokrasi (*doing democracy*) sebagai modus pembelajaran. Melalui penerapan demokrasi, siswa diharapkan akan secepatnya memahami bahwa demokrasi itu penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dalam hal ini pembelajaran yang cocok dengan hal-hal tersebut adalah pembelajaran PKn dengan konsep dan paradigma baru yaitu pembelajaran berbasis portofolio yaitu melalui praktik belajar kewarganegaraan (*Project Citizen*) sebagai salah satu model adaptif dalam revitalisasi PKn (Winataputra; Budimansyah, 2008: 182) yang dapat menggantikan pembelajaran sebelumnya yang sering dikenal dengan pembelajaran konvensional.

4. Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan atau disingkat PKn merupakan salah satu mata pelajaran yang penting dalam suatu jenjang pendidikan, baik dijenjang sekolah dasar (SD), SMP, SMA dan perguruan tinggi, karena dalam mata pelajaran PKn perkembangan moral dan budi pekerti siswa sebagai warga negara yang baik sangat ditekankan dan dibentuk.

Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan sebelumnya dikenal dengan nama "Civics" dalam kurikulum SMA tahun 1962. mata pelajaran ini berisikan materi tentang pemerintahan indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Dept. P & K :1962). Selanjutnya dalam kurikulum 1975 istilah tersebut diganti dengan Pendidikan Moral Pancasila (PMP), yang berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. perubahan ini sejalan dengan misi pendidikan yang diamanatkan oleh Tap. MPR II/MPR/1973. Mata pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib untuk SD, SMP, SMA, SPG dan sekolah kejuruan.

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa pendidikan dilakukan agar mendapatkan tujuan yang diharapkan bersama yaitu :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 UU RI No20/2003)

Memperhatikan isi dari UU tersebut di atas tentang sistem pendidikan nasional, bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh keberhasilan pendidikan dari bangsa itu sendiri. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan maka setiap pelaku pendidikan harus memahami tujuan pendidikan nasional, yaitu membangun kualitas manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dapat meningkatkan hubungan dengan-Nya, sebagai warga Negara yang ber Pancasila mempunyai semangat dan kesadaran yang tinggi, berbudi pekerti yang luhur dan berkepribadian yang kuat, cerdas, terampil, dapat mengembangkan dan menumbuhkan sikap demokrasi, dapat memelihara hubungan yang baik antara sesama manusia dengan lingkungan, serta sehat jasmani dan rohani.

a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pada hakikatnya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk menyiapkan para siswa kelak sebagai warga masyarakat sekaligus warga negara yang baik. Sehubungan dengan tujuan pendidikan nasional tersebut, maka pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam jenjang pendidikan dasar dan menengah secara konseptual mengandung komitmen utama dalam pencapaian dimensi tujuan pengembangan kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Berdasarkan orientasi pada komitmen tersebut, maka peran dan fungsi serta tanggung jawab guru Pendidikan Kewarganegaraan pada setiap jenjang pendidikan diharapkan untuk mampu menjadikan para siswa

sebagai para calon warga negara yang baik. adapun ciri-cirinya antara lain religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, toleran, sadar akan hak dan kewajiban, mencintai kebenaran dan keadilan, peka terhadap lingkungan, mandiri dan percaya diri, sederhana, terbuka penuh pengertian terhadap kritik dan saran, patuh dan taat terhadap peraturan, serta kreatif dan inovatif.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah salah satu wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berfikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.

Winataputra (2001: 131) memperhatikan perkembangan pemikiran tentang *civic* dan *civic education*, atas dasar kajiannya secara teoritik, Winataputra merumuskan pengertian "*civics*," *citizenship/civic education*" sebagai berikut:

- a. *"Civics is the study of government taught in the schools. It is an area of learning dealing with how democratic government has been and should be carried out, and how the citizen should carry out his duties and rights purposefully with full responsibility."*
- b. *"Civic/Citizenship education can be defined in two ways:*
 1. *In the first sense, Civic Education is an area of learning, primarily intended to develop knowledge attitudes, and skills so the students become "good citizens, with learning experiences carefully selected and organized around the basic concepts of political science,*
 2. *In another sense, Civic Education is a by-product of variety of areas of learning undertaken in and out-of formal school settings as well as a by-product of a complex network of human interactions in daily activities concerned with the development of civic responsibility."*

Disimpulkan berdasarkan pendapat Winataputra di atas, bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang berisikan tentang pemerintahan yang diajarkan di sekolah, dimana dalam keadaan pemerintahan yang demokratis tersebut, warga negara hendaknya melaksanakan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.

Definisi pendidikan kewarganegaraan berikutnya menurut Winataputra, bahwa pendidikan kewarganegaraan juga berisikan tentang bagaimana mengembangkan sikap, keterampilan siswa untuk menjadi warga negara yang baik, dimana siswa bisa mendapatkannya melalui pengalaman belajar dan memiliki konsep-konsep dasar ilmu politik. Juga dalam pendidikan kewarganegaraan, siswa dapat berinteraksi melalui kehidupan sehari-hari untuk berkembang menjadi warga negara yang bertanggung jawab.

Berdasarkan Modul Kapita Selekt PKn (Standar Isi BSNP 2006: 7) pengertian PKn adalah :

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia, yang diwujudkan dalam bentuk perilaku sehari-hari, baik sebagai individu, anggota masyarakat maupun makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang membekali siswa dengan budi pekerti, pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan warga negara dengan negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa PKn merupakan suatu mata pelajaran yang membekali siswa dengan budi pekerti, pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan warga negara dengan negara, serta pendidikan pendahuluan bela

Negara yang bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia agar menjadi warga negara yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri dan dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Menurut M Daryono (1997:1) Pendidikan Kewarganegaraan adalah “nama dari suatu mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum sekolah”.

SK Mendikbud (No.060/U/1993:69), ”Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan sebagai usaha untuk membekali siswa dengan budi pekerti, pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara sesama warga negara maupun antar warga negara serta pendidikan pendahuluan bela negara”.

Menurut kurikulum 2004 Paradigma Baru pasca KBK (2003:2) “Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu mata pelajaran yang terdapat dalam sekolah yang berusaha membina perkembangan moral anak didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, agar dapat mencapai perkembangan secara optimal dan dapat diwujudkan dalam kehidupannya sehari-hari.

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, merupakan produk Lembaga Tertinggi Negara Tahun 1973. Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan konsekuensi dari pengakuan atas kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila, secara yuridis formal telah diterima sebagai dasar negara. Konsekuensi dari pernyataan tersebut ialah bahwa dalam penyelenggaraan negara segala gerak langkahnya harus sejalan dan didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Ki Hadjar Dewantara (1950:1 dan 4) mengatakan bahwa “di dalam Pancasila dapat dikemukakan sifat-sifat pokok dari kehalusan dan keluhuran budi manusia”.

Jalur sekolah adalah salah satu wahana strategis untuk mengembangkan dan mencapai tujuan pendidikan melalui proses pendidikan yang menyatukan pengembangan ranah pengetahuan, keterampilan, serta sikap, dan nilai untuk mengembangkan kepribadian dan perwujudan dari anak didik. Hal ini disebabkan karena sekolah, memiliki program terarah dan terencana, serta memiliki komponen-komponen pendidikan yang saling berinteraksi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan. Demikian juga saling berperannya berbagai mata pelajaran yang secara integratif membina tercapainya sifat-sifat yang diharapkan dimiliki oleh seorang warga negara Indonesia yang terdidik.

Sebagai mata pelajaran, PKn membawa misi khusus dalam pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Tujuan pendidikan yang pencapaiannya dibebankan kepada mata pelajaran, dalam hal ini mata pelajaran PKn,

adalah membimbing generasi muda untuk memahami dan menghayati Pancasila secara keseluruhan dan setiap sila darinya (*Kerangka Program PKn*).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah suatu usaha sadar, yang terencana dan terarah, melalui pendidikan formal, untuk mentransformasikan dan mengembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada anak didik. Pengembangan nilai dimaksudkan anak didik dapat mencerna melalui akalinya, dan menumbuhkan rasionalitas sesuai dengan kemampuannya mengembangkan rasionalitas tentang nilai Pancasila, sehingga anak akan mencapai perkembangan penalaran moral seoptimal mungkin.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berusaha membentuk manusia Indonesia seutuhnya sebagai perwujudan kepribadian Pancasila, yang mampu melaksanakan pembangunan masyarakat Pancasila. Maka Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menduduki tempat yang sangat sentral dan strategis dalam konstelasi pendidikan nasional.

b. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berusaha membentuk manusia seutuhnya sebagai perwujudan kepribadian bangsa, yang melaksanakan pembangunan masyarakat Pancasila, tanpa PKn, segala kepintaran atau akal, ketinggian ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan dan kecekatan, tidak memberikan jaminan pada terwujudnya masyarakat Pancasila". Menurut M. Daryono dkk (1997:29)“

Sriyono (1992: 123), menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan lebih ditekankan pada aspek moral dengan tujuan mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa PKn mempunyai kedudukan yang sangat penting, khususnya dalam pembentukan kepribadian manusia Indonesia yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tidak bisa lepas dari pendidikan nasional, dalam arti merupakan satu kesatuan dalam sistem pendidikan nasional untuk mewujudkan pendidikan nasional.

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter, dalam kehidupan yang demokratis. Dalam demokrasi konstitusional, *civic education* yang efektif adalah suatu keharusan karena kemampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat demokratis, berpikir kritis, dan bertindak secara sadar dalam dunia plural, memerlukan empati yang memungkinkan kita mendengar dan mengakomodasi pihak lain. Partisipasi warganegara dalam masyarakat demokratis, tentunya didasarkan pada pengetahuan, refleksi kritis dan pemahaman serta penerimaan akan hak dan kewajiban serta tanggung jawab warganegara.

Menurut kurikulum 2004 Paradigma Baru PKn berdasarkan standar isi BSNP (Departemen Pendidikan Nasional, 2003: 2) Tujuan Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut :

- 1) Berpikir secara kritis rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- 2) Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 3) Berkembang secara positif dan demokratis berkembang diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dan dengan bangsa-bangsa lainnya.
- 4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Menurut Ace Suryadi, (2009: 15) bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah terwujudnya partisipasi penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik warganegara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan ialah mendidik peserta didik untuk dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai warga negara republik Indonesia, terdidik dan bertanggung jawab.

Pendidikan kewarganegaraan yang dimanifestasikan di dalam kurikulum sekolah ialah sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara

Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.

c. Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan

Pada bagian yang lain dalam Paradigma Baru PKn (Tim Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah 2006: 11) disebutkan juga fungsi Pendidikan Kewarganegaraan.

Fungsi dari Pendidikan Kewarganegaraan ialah :

1. Mengembangkan dan melestarikan nilai luhur Pancasila secara dinamis dan terbuka dalam arti bahwa nilai moral yang dikembangkan mampu menjawab tantangan perkembangan dalam masyarakat, tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia, yang merdeka, bersatu, dan berdaulat
2. Mengembangkan dan membina manusia Indonesia seutuhnya yang sadar politik dan konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-undang 1945.
3. Membina pengalaman dan kesadaran terhadap hubungan antara warga negara dengan negara, antara warga negara dengan sesama warga Negara dan pendidikan pendahuluan bela negara agar mengetahui dan mampu melaksanakan dengan baik hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat dikatakan bahwa mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan suatu wahana yang berfungsi melestarikan nilai luhur Pancasila, mengembangkan dan membina manusia Indonesia seutuhnya serta membina pengalaman dan kesadaran warga negara untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang dapat bertanggung jawab dan dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Seperti halnya mata pelajaran lain, mata pelajaran PKn di sekolah memiliki rambu-rambu dalam proses pembelajarannya. Rambu-rambu ini

berfungsi untuk menjadi acuan guru mata pelajaran PKn dalam melaksanakan proses pembelajaran yang dapat menciptakan suatu pembelajaran yang aktif, efektif dan efisien.

Berdasarkan Standar Isi BSNP 2006:14 disebutkan bahwa :

Rambu-rambu pembelajaran PKn yaitu :

- 1) Membina tatanan nilai moral Pancasila secara utuh, bulat dan berkesinambungan sebagai dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup bangsa dan perjanjian luhur bangsa Indonesia.
- 2) Wujud pembinaan dalam garis-garis besar proses pembelajaran PKn melalui pembinaan konsep nilai moral Pancasila.
- 3) Membudayakan Pancasila secara dini, terprogram dan terus menerus.
- 4) Garis-garis besar proses pembelajaran PKn adalah salah satu perangkat kurikulum dan pedoman bagi guru.
- 5) Garis-garis besar proses pembelajaran PKn merupakan program minimal yang diorganisasikan ke dalam sistem semester, jatah waktunya 16 kali pertemuan.
- 6) Nilai-nilai yang dikembangkan dalam garis-garis besar proses pembelajaran PKn adalah nilai-nilai dasar Pancasila yang dijabarkan ke dalam nilai instrumental.
- 7) Rumusan tujuan PKn setiap kelas mengandung nilai moral Pancasila yang harus dikembangkan pada tingkat atau kelas dalam bentuk tujuan instruksional khusus.
- 8) Prinsip penyajian nilai dimuali dari mudah ke sukar, sederhana ke rumit, konkrit ke abstrak, lingkungan kehidupan siswa.
- 9) Penentuan kegiatan belajar mengajar didasarkan pada kebermanfaatan, kedekatan, dan harapan masyarakat, bangsa dan negara.
- 10) Uraian setiap pokok bahasan mencakup dua proses, yaitu pengenalan nilai, dan pembahasan atau pengamalannya.
- 11) Melakukan hubungan, bebas memilih strategi, metode dan media serta evaluasi, yang melibatkan orang tua dan masyarakat.

Berdasarkan pernyataan yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, mata pelajaran PKn merupakan suatu mata pelajaran yang mementingkan perubahan pada tingkah laku siswa, sehingga dalam proses pelaksanaan pembelajarannya harus terfokus pada siswa. Dalam

pelaksanaan pembelajaran tersebut seorang guru harus dapat mengembangkan segala kemampuan yang ia miliki, dengan tetap berpatokan pada rambu-rambu pembelajaran yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan demi tercapainya tujuan pembelajaran.

d. Visi dan Misi Pendidikan Kewarganegaraan

Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan pasca KBK memiliki karakteristik pendidikan pengajarannya, sehingga ia mengemban misi (Standar isi BSNP) :

1. Mengembangkan kerangka berpikir baru yang dapat dijadikan landasan yang rasional untuk menyusun PKn baru, sebagai pendidikan intelektual kearah pembentukan warga negara yang demokratis. Misi tersebut dilakukan melalui penetapan kemampuan dasar PKn, sebagai landasan penyusunan standar kemampuan serta standar minimum yang ditetapkan secara rasional.
2. Menyusun substansi PKn baru sebagai pendidikan demokrasi yang berlandaskan pada latar belakang sosial budaya serta dalam konteks politik, kenegaraan, dan landasan konstitusi yang dituangkan dalam sila-sila demokrasi Indonesia. Misi tersebut dilakukan melalui penyusunan uraian materi pada masing-masing standar materi PKn yang dapat memfasilitasi berkembangnya pendidikan demokrasi.

Visi Pendidikan Kewarganegaraan menurut standar isi BSNP ialah (Tim Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2006) :

“Mewujudkan proses pendidikan yang integral di sekolah untuk pengembangan kemampuan dan kepribadian warga negara yang cerdas, partisipatif dan bertanggung jawab yang pada gilirannya akan menjadi landasan untuk berkembangnya masyarakat Indonesia yang demokratis”.

Misi dan visi tersebut, sangat jelas bahwa untuk membentuk warga negara yang baik sangat dibutuhkan konsep pendidikan yang demokratis yang diartikan sebagai tatanan konseptual yang menggambarkan keseluruhan upaya sistematis untuk mengembangkan cita-cita, nilai-nilai, prinsip, dan pola perilaku demokrasi dalam diri individu warga negara dalam tatanan iklim yang demokratis.

4. Pengertian Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata Yunani, *demos* dan *kratos*. *Demos* mempunyai arti rakyat, dan *kratos* berarti pemerintahan. Secara keseluruhan demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat, dimana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih melalui pemilihan umum. Pemerintah di negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat setiap warga negara, menegakkan *rule of law*, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak minoritas, dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak .

Pengertian tersebut di atas tampak bahwa demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara dimana setiap warga negara dewasa dapat turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih, melalui pemilihan umum dan adanya jaminan suatu kemerdekaan untuk berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan *rule of law*, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas, dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi peluang yang sama.

Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, mengintegrasikan demokrasi sebagai sistem yang memiliki sebelas pilar, yakni :

1. Kedaulatan rakyat
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
3. Kekuasaan mayoritas
4. Hak-hak minoritas
5. Jaminan Hak Asasi Manusia
6. Pemilihan yang bebas dan jujur
7. Persamaan di depan hukum
8. Proses hukum yang wajar
9. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional
10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik
11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat.

Menurut Amin Rais dalam C.B. Macpherson, (1986: 35) merumuskan menjadi 10 kriteria idealnya demokrasi, yakni (1) partisipasi dalam pembuatan keputusan, (2) persamaan di depan hukum, (3) distribusi pendapatan secara adil, (4) kesempatan pendidikan yang sama, (5) demokrasi memiliki empat macam kebebasan, (6) ketersediaan dan keterbukaan informasi, (7) mengindahkan fatsoen, (8) kebebasan individu, (9) semangat kerjasama, (10) hak untuk protes.

Hal tersebut menumbuhkan keyakinan akan baiknya sistem demokrasi, serta terwujudnya kriteria ideal dari demokrasi, maka harus ada pola perilaku yang menjadi tuntunan atau norma/ nilai-nilai demokrasi yang diyakini masyarakat. Nilai-nilai dari demokrasi membutuhkan suatu demokrasi yang dilakukan dengan lima nilai yaitu menghargai keberagaman, dilakukan dengan jujur dan menggunakan akal sehat, dilaksanakan dengan kerja sama antarwarga negara, didasari sikap dewasa dan mempertimbangkan moral, maka setiap keputusan dan tingkah laku akan efisien dan efektif serta pencapaian tujuan masyarakat adil dan makmur akan lebih mudah tercapai.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi diartikan sebagai: “gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara”.

Hasbullah (2006: 49-51) mengemukakan demokrasi dalam pengertian lebih luas, patut dianalisa sehingga memberikan manfaat dalam praktik kehidupan dan pendidikan yang paling tidak mengandung hal-hal sebagai berikut :

a. Rasa Hormat terhadap Harkat Sesama Manusia

Demokrasi dianggap sebagai pilar pertama untuk menjamin persaudaraan hak manusia dengan tidak memandang jenis kelamin, umur, warna kulit, agama dan bangsa. Dalam pendidikan, nilai-nilai inilah yang ditanamkan dengan memandang perbedaan antara individu yang satu dengan yang lainnya, baik hubungan antara sesama peserta didik atau hubungan antara peserta didik dengan gurunya yang saling menghargai dan menghormati.

b. Setiap Manusia Memiliki Perubahan ke Arah Pikiran yang Sehat

Acuan inilah yang melahirkan adanya pandangan bahwa manusia itu haruslah dididik. Dengan pendidikanlah manusia akan berubah dan berkembang kearah yang lebih sehat dan baik serta sempurna. Oleh karena itu, sebagai lembaga pendidikan sekolah diharapkan dapat mengembangkan anak didik untuk berfikir dan memecahkan persoalan-persoalan sendiri secara teratur, sistematis dan komperhensif serta kritis sehingga anak memiliki wawasan, kemampuan, dan kesempatan yang luas. Tentunya dalam proses seperti ini diperlukan sikap yang demokratis dan tidak terjadi pemaksaan pandangan terhadap orang lain.

c. Rela Berbakti untuk Kepentingan dan Kesejahteraan Bersama

Dalam konteks ini, pengertian demokrasi tidaklah dibatasi oleh kepentingan individu-individu lain. Dengan kata lain, seseorang menjadi bebas karena orang lain menghormati kepentingannya. Norma-norma atau aturan serta tata nilai ang terdapat di masyarakat itulah yang membatasi dan mengendalikan kebebasan setiap orang. Untuk itu, warga negara yang demokratis akan dapat menerima pembatasan kebebasan itu dengan rela hati. Artinya tiap-tiap warga negara hendaklah memahami kewajibannya sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara dari suatu negara demokratis yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya.

Berkenaan dengan itulah maka bagi setiap warga negara diperlukan hal-hal berikut ini :

- a. Pengetahuan yang cukup tentang masalah-masalah kewarganegaraan, kemasyarakatan, dan soal-soal pemerintahan yang penting.
- b. Suatu keinsyafan dan kesanggupan semangat menjalankan tugasnya, dengan mendahulukan kepentingan negara atau masyarakat daripada kepentingan sendiri atau kepentingan sekelompok kecil manusia.
- c. Suatu keinsyafan dan kesanggupan memberantas kecurangan-kecurangan dan perbuatan-perbuatan yang menghalangi kemajuan dan kemakmuran masyarakat dan pemerintah.

Yang paling utama dalam berlakunya demokrasi di suatu negara ialah ada atau tidaknya asas-asas demokrasi, yaitu :

1. Pengakuan hak-hak asasi manusia sebagai penghargaan terhadap martabat manusia dengan tidak melupakan kepentingan umum.
2. Adanya partisipasi dan dukungan rakyat kepada pemerintah, jika dukungan rakyat tidak ada, sulitlah bahwa pemerintah itu adalah suatu pemerintahan demokrasi.

Menurut Pidie (1986) menuraikan makna demokrasi yang didekati dari arti formal adalah sebagai suatu sistem politik atau sistem pemerintahan dimana kedaulatan rakyat itu tidak dilaksanakan sendiri oleh rakyat, melainkan melalui wakil-wakil yang dipilihnya dilembaga perwakilan. Sedangkan dalam arti materiel disebut demokrasi sebagai asas, yang dipengaruhi oleh kultur, historis suatu bangsa sehingga dikenal demokrasi konstutusional, demokrasi rakyat, dan demokrasi pancasila.

Alamudi (1991) menjelaskan bahwa demokrasi, sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk dari sejarah panjang dan berliku-liku serta demokrasi merupakan pelembagaan dari kebebasan.

Menurut M. Durverger (1954), demokrasi adalah termasuk cara pemerintahan, dimana golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah itu sama dan tidak terpisah-pisah.

Dari berbagai pengertian demokrasi sebagaimana dikemukakan di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa demokrasi menekankan adanya prinsip-prinsip persamaan dan kebebasan yang dilandasi oleh norma-norma atau aturan yang berlaku. Dan disamping itu bahwa demokrasi merupakan konsep yang memiliki makna dan ciri-ciri dasar yang bersifat universal atau berlaku secara umum. Namun dalam penerapannya setiap negara memiliki kekhasan masing-masing. Penerapan demokrasi dalam suatu negara, bergantung kepada 1). ideologi dan falsafah yang dianutnya, 2). sistem nilai budaya yang dianutnya, 3). karakteristik masyarakatnya dan 4). sejarah kehidupan bangsa dan negaranya. Oleh karena hal tersebutlah sehingga yang menjadi dasar penerapan demokrasi di berbagai negara itu memiliki ciri khas masing-masing sesuai dengan karakter bangsa dan negaranya tersebut.

6. Materi Demokrasi Dalam Kurikulum Sekolah

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pelajaran yang tersusun secara hierarkis dan memuat konsep-konsep yang saling berkaitan, antara konsep

yang satu dengan konsep yang lain, yang membekali siswa dengan budi pekerti, pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan warga negara dengan negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara yang bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia agar menjadi warga negara yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri dan dapat diandalkan bangsa dan negara.

Materi Demokrasi adalah pokok bahasan yang terdapat pada kurikulum sekolah menengah pertama dan termasuk dalam dimensi pendidikan kewarganegaraan. Dalam Pendidikan Kewarganegaraan materi demokrasi merupakan materi prasyarat untuk materi selanjutnya, misalnya materi demokrasi yang dipelajari pada tingkat SMP akan ditampilkan kembali pada tingkat SMA dalam materi sistem politik Indonesia yang di dalamnya mencakup pelaksanaan sistem politik yang berlaku di Indonesia. Materi demokrasi adalah materi atau pokok bahasan yang bersumber pada sila keempat dari Pancasila, yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Materi yang sangat dekat dengan nilai-nilai demokrasi adalah pada materi kelas VII (tujuh) dan kelas VIII (delapan). Untuk lebih jelasnya standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Kelas VII, Semester 1

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1. Menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	1.1 Mendeskripsikan hakikat norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, peraturan, yang berlaku dalam masyarakat 1.2 Menjelaskan hakikat dan arti penting hukum bagi warganegara 1.3 Menerapkan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Mendeskripsikan makna Proklamasi Kemerdekaan dan konstitusi pertama	2.1 Menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan 2.2 Mendeskripsikan suasana kebatinan konstitusi pertama 2.3 Menganalisis hubungan antara proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945 2.4 Menunjukkan sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan dan suasana kebatinan konstitusi pertama

Kelas VII, Semester 2

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
3. Menampilkan sikap positif terhadap perlindungan dan penegakan Hak Azasi Manusia (HAM)	3.1 Menguraikan hakikat, hukum dan kelembagaan HAM 3.2 Mendeskripsikan kasus pelanggaran dan upaya penegakan HAM 3.3 Menghargai upaya perlindungan HAM 3.4 Menghargai upaya penegakan HAM
4. Menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat	4.1 Menjelaskan hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat 4.2 Menguraikan pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab 4.3 Mengaktualisasikan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab

Kelas VIII, Semester 1

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1. Menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila	1.1 Menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara 1.2 Menguraikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara 1.3 Menunjukkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 1.4 Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat
2. Memahami berbagai konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia	2.1 Menjelaskan berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia 2.2 Menganalisis penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang berlaku di Indonesia 2.3 Menunjukkan hasil-hasil amandemen UUD 1945 2.4 Menampilkan sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen
3. Menampilkan ketaatan terhadap perundang-undangan nasional	3.1 Mengidentifikasi tata urutan peraturan perundang-undangan nasional 3.2 Mendeskripsikan proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional 3.3 Mentaati peraturan perundang-undangan nasional 3.4 Mengidentifikasi kasus korupsi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia 3.5 Mendeskripsikan pengertian anti korupsi dan instrumen (hukum dan kelembagaan) anti korupsi di Indonesia

Kelas VIII, Semester 2

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
4. Memahami pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan	4.1 Menjelaskan hakikat demokrasi 4.2 Menjelaskan pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 4.3 Menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai

	kehidupan
5. Memahami kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan di Indonesia	<p>5.1 Menjelaskan makna kedaulatan rakyat</p> <p>5.2 Mendeskripsikan sistem pemerintahan Indonesia dan peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat</p> <p>5.3 Menunjukkan sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia</p>

Dari penjabaran tabel 1 di atas tersebut, maka sikap demokrasi memang sudah seharusnya telah tertanam atau ditanamkan sejak dini dalam benak warga negara dan dapat diamalkan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sekolah formal dicirikan dengan adanya kurikulum yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kependidikan (SD,SMP,SMA). Konsep atau materi yang akan disampaikan oleh guru kepada siswa harus disesuaikan dengan tingkat kependidikan siswa menurut kurikulum yang berlaku, dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan penguasaan konsep karena tidak sesuai dengan tingkat kematangan siswa.

Hal ini diungkapkan juga oleh Wibowo dkk (1997: 11) yang menyatakan bahwa: “Apabila murid tidak memahami suatu konsep salah satu kemungkinannya adalah murid tersebut belum sampai pada tingkat kematangan (*mature*) tertentu yang sesuai dengan tingkat kesukaran konsep”.

Telah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dalam standar isi pendidikan kewarganegaraan SMP/MTS bahwa standar kompetensi pada materi demokrasi adalah “Memahami pelaksanaan demokrasi dalam

berbagai aspek kehidupan”, sedangkan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa adalah “ menjelaskan hakikat demokrasi, menjelaskan pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan”.

B. Model Pembelajaran *Example Non Example*

1. Pengertian.

Konsep pada umumnya dipelajari melalui dua cara. Paling banyak konsep yang kita pelajari di luar sekolah melalui pengamatan dan juga dipelajari melalui definisi konsep itu sendiri. *Example Non example* adalah taktik yang dapat digunakan untuk mengajarkan definisi konsep. Taktik ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa secara cepat dengan menggunakan 2 hal yang terdiri dari *example* dan *non-example* dari suatu definisi konsep yang ada, dan meminta siswa untuk mengklasifikasikan keduanya sesuai dengan konsep yang ada. *Example* memberikan gambaran akan sesuatu yang menjadi contoh akan suatu materi yang sedang dibahas, sedangkan *non-example* memberikan gambaran akan sesuatu yang bukanlah contoh dari suatu materi yang sedang dibahas (Hamzah, 2005: 113).

Example Non Example dianggap perlu dilakukan karena suatu definisi konsep adalah suatu konsep yang diketahui secara primer hanya dari segi definisinya daripada dari sifat fisiknya. Dengan memusatkan perhatian siswa terhadap *example* dan *non-example* diharapkan akan dapat mendorong siswa untuk menuju pemahaman yang lebih dalam mengenai materi yang ada.

Menurut Buehl (1996) *examples non examples* adalah taktik yang dapat digunakan untuk mengajarkan definisi konsep. Taktik ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa secara cepat dengan menggunakan 2 hal yang terdiri dari *examples non examples* dari suatu definisi konsep yang ada dan meminta siswa untuk mengklasifikasikan keduanya sesuai dengan konsep yang ada. *Examples* memberikan gambaran akan sesuatu yang menjadi contoh akan suatu materi yang sedang dibahas, sedangkan *non examples* memberikan gambaran akan sesuatu yang bukanlah contoh dari suatu materi yang sedang dibahas.

Menurut Buehl (1996) keuntungan dari model *examples non examples* antara lain:

- a. Siswa berangkat dari suatu definisi yang selanjutnya digunakan untuk memperluas pemahamannya dengan lebih mendalam dan lebih kompleks.
- b. Siswa terlibat dalam satu proses *discovery* (penemuan), yang mendorong mereka untuk membangun konsep secara progresif melalui pengalaman dari *examples non examples*.
- c. Siswa diberi sesuatu yang berlawanan untuk mengeksplorasi karakteristik dari suatu konsep dengan mempertimbangkan bagian *non examples* yang dimungkinkan masih terdapat beberapa bagian yang merupakan suatu karakter dari konsep yang telah dipaparkan pada bagian *examples*.

Menurut Buehl (Depdiknas, 2007:219) mengemukakan keuntungan metode *example non example* antara lain:

- a. Siswa berangkat dari satu definisi yang selanjutnya digunakan untuk memperluas pemahaman konsepnya dengan lebih mendalam dan lebih kompleks.
- b. Siswa terlibat dalam satu proses *discovery* (penemuan), yang mendorong mereka untuk membangun konsep secara progresif melalui pengalaman dari *example* dan *non example*
- c. Siswa diberi sesuatu yang berlawanan untuk mengeksplorasi karakteristik dari suatu konsep dengan mempertimbangkan bagian *non example* yang dimungkinkan masih terdapat beberapa bagian yang merupakan suatu karakter dari konsep yang telah dipaparkan pada bagian *example*.

Tennyson dan Pork (Slavin, 2002) menyarankan bahwa jika guru akan menyajikan contoh dari suatu konsep maka ada tiga hal yang seharusnya diperhatikan, yaitu:

- a. Urutkan contoh dari yang gampang ke yang sulit.
- b. Pilih contoh-contoh yang berbeda satu sama lain.
- c. Bandingkan dan bedakan contoh-contoh dan bukan contoh.

Berdasarkan uraian di atas, maka menyiapkan pengalaman dengan contoh dan non-contoh akan membantu siswa untuk membangun makna yang kaya dan lebih mendalam dari sebuah konsep penting. Joyce and Weil (Suratno, 2009:1) telah memberikan kerangka konsep terkait strategi tindakan, yang menggunakan metode *Example Non example*, sebagai berikut:

- a. Menggeneralisasikan pasangan antara contoh dan non-contoh yang menjelaskan beberapa dari sebagian besar karakter atau atribut dari konsep baru. Menyajikan itu dalam satu waktu dan meminta siswa untuk memikirkan perbedaan apa yang terdapat pada dua daftar tersebut. Selama siswa memikirkan tentang tiap *examples* dan *non-examples* tersebut, tanyakanlah pada mereka apa yang membuat kedua daftar itu berbeda.
- b. Menyiapkan *examples* dan *non examples* tambahan, mengenai konsep yang lebih spesifik untuk mendorong siswa mengecek hipotesis yang telah dibuatnya sehingga mampu memahami konsep yang baru.
- c. Meminta siswa untuk bekerja berpasangan untuk menggeneralisasikan konsep *examples* dan *non-examples* mereka. Setelah itu meminta tiap pasangan untuk menginformasikan di kelas untuk mendiskusikannya secara klasikal sehingga tiap siswa dapat memberikan umpan balik.
- d. Sebagai bagian penutup, adalah meminta siswa untuk mendeskripsikan konsep yang telah diperoleh dengan menggunakan karakter yang telah didapat dari *examples* dan *non-examples*.

Berdasarkan hal di atas, maka penggunaan metode example non example pada prinsipnya adalah upaya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk menemukan konsep pelajarannya sendiri melalui kegiatan mendeskripsikan pemberian contoh dan bukan contoh terhadap materi yang sedang dipelajari.

2. Kelebihan dan Kekurangan

Menurut Buehl (1996) keuntungan dari metode *Example non Example* antara lain:

1. Siswa berangkat dari satu definisi yang selanjutnya digunakan untuk memperluas pemahaman konsepnya dengan lebih mendalam dan lebih kompleks.
2. Siswa terlibat dalam satu proses *discovery* (penemuan), yang mendorong mereka untuk membangun konsep secara progresif melalui pengalaman dari *Example non Example*.
3. Siswa diberi sesuatu yang berlawanan untuk mengeksplorasi karakteristik dari suatu konsep dengan mempertimbangkan bagian *non example* yang dimungkinkan masih terdapat beberapa bagian yang merupakan suatu karakter dari konsep yang telah dipaparkan pada bagian *example*.

Kebaikan:

- a. Siswa lebih kritis dalam menganalisa gambar.
- b. Siswa mengetahui aplikasi dari materi berupa contoh gambar.
- c. Siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya.

Kekurangan:

- a. Tidak semua materi dapat disajikan dalam bentuk gambar.
- b. Memakan waktu yang lama.

3. Langkah-langkah dalam penerapan model pembelajaran *example non example*.

- a) Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran
- b) Guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan lewat OHP
- c) Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan kepada siswa untuk memperhatikan / menganalisa gambar.
- d) Melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa, hasil diskusi dari analisa gambar tersebut dicatat pada kertas.
- e) Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya.
- f) Mulai dari komentar / hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai.
- g) Kesimpulan.

Diperlukan model pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan keaktifan siswa di dalam proses pembelajaran yang ditandai dengan aktivitas siswa yang meningkat, sehingga ketuntasan belajar dapat tercapai. Model pembelajaran tersebut adalah model *example non example*.

Pembelajaran *Example Non Example* adalah suatu proses belajar mengajar di dalam kelas dimana siswa diberikan contoh-contoh gambar yang menarik dan berhubungan dengan materi pembelajaran. Kemudian siswa diminta untuk mendiskusikan secara kelompok, tugas guru adalah merangsang untuk berfikir kritis dalam memecahkan masalah yang ada. Tugas guru juga mengarahkan siswa untuk berani menyampaikan pendapat, bertanya dan menjawab serta menyimpulkan permasalahan.